

# PENGARUH SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DISPARITAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Vindy Nerson Kalay<sup>1</sup>, Julie Abdullah<sup>2</sup>, Onong Junus<sup>3</sup>, Saprudin<sup>4</sup>,  
Mohamad Abdul Radjak Masjhur<sup>5\*</sup>, Anggita Permata Yakup<sup>6</sup>

Universitas Gorontalo<sup>123456</sup>

e-mail : [radjak@unigo.ac.id](mailto:radjak@unigo.ac.id)

**Abstract:** This study aims to examine the impact of the Regional Government Information System (SIPD) on disparities in regional financial management accountability in North Sulawesi Province. The study used primary data collected from 96 respondents through online questionnaires and field observations. A quantitative descriptive approach with simple linear regression analysis was employed. The results indicate that SIPD implementation has generally been well executed across most local governments, as reflected by high average scores for the SIPD variable. However, disparities in financial management accountability among regions persist, influenced by internal factors such as human resource capacity, technological infrastructure, and institutional readiness. The findings demonstrate that effective implementation of SIPD significantly contributes to reducing disparities in regional financial management accountability.

**Keywords:** local government information system, disparity in local financial management accountability

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap disparitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari 96 responden melalui kuesioner daring dan observasi lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD pada sebagian besar pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, yang tercermin dari skor rata-rata variabel SIPD dalam kategori tinggi. Namun demikian, masih terdapat perbedaan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan antardaerah, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kesiapan kelembagaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa SIPD berpengaruh signifikan dalam mengurangi disparitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**Kata kunci:** sistem informasi pemerintah daerah, disparitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

## Latar Belakang

Dalam pengembangan sistem akuntansi, teknologi canggih seperti yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAPD) sangat penting. Penelitian Fitriasari, (2024) menunjukkan bahwa SAPD mencakup regulasi sistem

akuntansi, proses, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Teknologi informasi ini dimanfaatkan melalui aplikasi untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan prosedur bisnis, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan keandalan SAPD, memfasilitasi kerangka kerja pemerintahan yang efektif, efisien, bertanggung jawab, dan transparan. Hal ini sejalan dengan temuan Istigfarin dan Andayani, (2023) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam SAPD masih belum memadai. Perbedaan terlihat pada kemampuan aparatur dalam menggunakan aplikasi, cara kerja dalam pengelolaan data keuangan, serta pemanfaatan hasil pengolahan data SIPD. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan praktik pengelolaan keuangan antar daerah yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan SIPD. Pemerintah daerah diharapkan untuk menyediakan statistik yang berkaitan dengan pembangunan dan keuangan daerah. Pendekatan ini dapat digunakan untuk meningkatkan integrasi pemanfaatan data mengenai kemajuan pembangunan di setiap instansi pemerintah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bertugas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah mengenai anggaran, perbendaharaan akuntansi, dan pelaporan keuangan. Jika SIPD diimplementasikan secara efektif, tata kelola pemerintahan akan lebih baik, menghasilkan banyak keuntungan seperti perencanaan, pengendalian, dan penilaian pembangunan daerah yang lebih baik, serta akses yang lebih mudah ke data yang belum diolah. Informasi dan data yang mudah diakses akan memfasilitasi peningkatan provinsi, yang berasal dari informasi tambahan yang akurat, komprehensif, dan akuntabel, di samping terciptanya kumpulan data yang andal untuk kemajuan semua kabupaten, yang berfungsi sebagai masukan bagi manajemen daerah.

Peralihan dari SIMDA ke SIPD diantisipasi akan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Kelemahan dalam implementasi SIPD terlihat jelas dalam operasionalnya, terutama dalam manajemen data keuangan, kerentanan

perangkat, dan pemeliharaan perangkat lunak. Implementasi SIPD, sebuah program berbasis web, diantisipasi akan mempercepat dan menyederhanakan pemantauan dan evaluasi layanan pemerintah, serta pengambilan data dan informasi yang akurat untuk perencanaan dan penganggaran pemerintah. Penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah membutuhkan tenaga terampil untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi.

Penyusunan laporan keuangan daerah masih terhambat oleh tantangan sumber daya manusia di setiap unit kerja, terutama perangkat daerah, yang merupakan kendala utama dalam penyusunan laporan keuangan. Sampai saat ini, penyusunan laporan keuangan daerah masih terkendala masalah SDM di masing-masing satuan kerja dalam hal ini aparatur daerah merupakan persoalan yang paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan. Memang, tidak semua individu yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan memiliki pengalaman latar belakang akuntansi.

Menurut Trinoviani, (2019), dan Sugiarto., (2020) sumber daya manusia merupakan salah satu dari empat elemen utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi SIPD. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BAPBD) tidak dapat menginput SIPD karena kurangnya kemampuan komputer di kalangan ASN. Selain keahlian ASN, peneliti menemukan bahwa perangkat input SIPD dan sumber daya anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah terbatas. Keterbatasan dana untuk bimbingan teknis dan pengadaan peralatan yang diperlukan untuk input SIPD juga memengaruhi hal ini, sebagaimana ditentukan oleh survei lapangan dan pengumpulan dokumentasi. menekankan bahwa sumber daya manusia yang cakap dalam akuntansi pemerintahan sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan daerah berkualitas tinggi secara efektif.

Menurut Hasibuan, (2016), sumber daya manusia yang cakap dan memiliki pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan sangat penting untuk penyusunan laporan keuangan berkualitas tinggi. Meskipun

demikian, penyelenggaraan program ini dianggap menantang karena perlunya kolaborasi dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua otoritas terkait. Penulis mengidentifikasi banyak kesulitan berdasarkan pengamatan awal dari penggunaan Simda yang berkelanjutan pada tahun sebelumnya.

Aplikasi ini kini terbatas pada tahap penganggaran keuangan dan hanya beroperasi di lokasi tertentu, terlepas dari kemampuan program SIPD. Akibatnya, kegunaan sistem dan kualitas informasi masih di bawah standar, mengingat aplikasi ini masih dalam tahap pengujian. Banyaknya opsi yang diperlukan untuk input SIPD seringkali menyebabkan karyawan melewatkan poin-poin input, yang mengakibatkan laporan yang tidak konsisten, penyesuaian anggaran yang tertunda, sistem penggajian yang terganggu, dan kegagalan jaringan SIPD yang berulang. Tantangan lainnya antara lain kesulitan menyiapkan anggaran kas, SPD, SPJ (Surat Pertanggungjawaban), SPP (Surat Perintah Membayar), dan hal ini karena kurangnya Bimtek dan pelatihan pengelolaan SIPD. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Utara, disparitas ini tercermin dari penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan lain sebagai *back-up*, kualitas sistem pengendalian intern, dan tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kesenjangan ini menandakan adanya perbedaan dalam kapasitas akuntabilitas, kecakapan sumber daya manusia, komitmen kepemimpinan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan sistem pelaporan keuangan.

Riset mutakhir yang dilakukan oleh Arif dan Firmansyah, (2024) menunjukkan bahwa disparitas akuntabilitas keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kompetensi aparatur dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk pelaksanaan sistem informasi keuangan dan kualitas pengawasan internal. Selain itu, penelitian dari Aditiya dan Kusuma, (2024) mengungkapkan bahwa integrasi SIPD secara penuh mampu

menekan disparitas akuntabilitas dengan menyediakan *platform* pelaporan yang lebih standar, transparan, dan terintegrasi antar-daerah. Namun demikian, di lapangan, pelaksanaan SIPD di Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya merata. Beberapa daerah masih mengalami hambatan dalam hal infrastruktur TIK, pelatihan SDM, dan keterbatasan anggaran. Disparitas SIPD ini turut memperlebar jurang disparitas akuntabilitas keuangan antara daerah yang mampu mengadopsi teknologi dengan baik dan daerah yang masih tertinggal. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena disparitas akuntabilitas dapat berdampak terhadap kepercayaan publik, efektivitas pengawasan, serta distribusi dana transfer pusat ke daerah.

Disparitas akuntabilitas dalam penelitian ini tidak diukur melalui perbandingan langsung antar kabupaten/kota menggunakan data sekunder. Pengukuran dilakukan melalui persepsi aparatur mengenai perbedaan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Pendekatan ini dipilih karena data pembandingan antar daerah tidak tersedia secara seragam. Oleh karena itu, variasi persepsi aparatur digunakan untuk menggambarkan adanya perbedaan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, mengurangi perbedaan akuntabilitas bukan semata-mata tujuan teknokratis, tetapi juga sarana untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang adil, setara, dan transparan yang berfokus pada pelayanan publik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap disparitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

## Studi Literatur

### Teori implementasi Kebijakan

Teori yang digunakan untuk implementasi kebijakan adalah “*A Model of the Policy Implementation*”. Teori ini digunakan untuk menilai kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan penerapan SIPD (Arif & Firmansyah, 2024).

Metodologi ini mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Elemen-elemen yang memengaruhi kebijakan meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya komunikasi, komunikasi antarorganisasi, atribut organisasi pelaksana, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi atau sikap para pelaksana.

### **Sistem Informasi Pembangunan Daerah**

SIPD dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun, (2014) tentang Pemerintahan Daerah. SIPD digunakan untuk penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan daerah, pengembangan kebijakan daerah, pelaksanaan penilaian kinerja, dan pengawasan keuangan daerah, sekaligus menyediakan statistik keuangan daerah untuk mendukung implementasi sistem informasi keuangan daerah secara nasional.

SIPD mencakup data keuangan daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi tentang pembangunan daerah, yang meliputi data perencanaan, analisis, profil, kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, faktor ekonomi, keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Data tersebut digunakan untuk penyusunan anggaran, rincian pelaksanaan keuangan, data akuntansi dan pelaporan keuangan, metrik akuntabilitas keuangan, data barang milik daerah, dan informasi keuangan daerah lainnya. Selain itu, informasi pemerintah daerah mencakup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang merinci pencapaian kinerja pemerintah daerah dan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyajikan hasil penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, beserta informasi mengenai Peraturan Daerah.

### **Disparitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam administrasi pemerintahan

untuk mencapai tata kelola yang efektif. Disparitas adalah ketidakseimbangan atau perbedaan signifikan antara dua hal atau lebih. Disparitas sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Disparitas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mengacu pada skenario yang kontras antara akuntansi sumber daya keuangan dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Ketidakkonsistenan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menurunkan kualitas pengawasan keuangan dan kinerja organisasi, yang mengakibatkan evaluasi yang kurang baik terhadap sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian, termasuk Fitriani, (2024), yang menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintah daerah secara langsung memengaruhi pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, dengan teknologi informasi sebagai faktor moderasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah (SIPD) memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kualitas Sistem Pelaporan Keuangan Daerah (LKPD) melalui pengelolaan keuangan daerah. Secara bersamaan, teknologi informasi dapat mengurangi dampak SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas LKPD. Penerapan SIPD diakui sebagai inisiatif pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi elektronik terpadu yang memfasilitasi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan yang transparan, bertanggung jawab, dan efektif.

Studi oleh Putri dan Hapsari, (2022) dan Paat dan Saleh, (2023) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, studi yang dilakukan oleh Lumuly dan Atarwaman R., (2024) mengungkapkan bahwa penerapan SIPD tidak memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Kota Ambon.

Sementara itu, disparitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mengacu pada adanya perbedaan signifikan antar pemerintah daerah dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan, kualitas laporan keuangan, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran publik. Ketidaksiesuaian ini kemungkinan disebabkan oleh variasi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan dedikasi kelembagaan terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Metodologi ini didasarkan pada gagasan bahwa pelaksanaan SIPD yang kuat dan adil akan mengurangi perbedaan akuntabilitas antar daerah. Sebaliknya, jika penerapan SIPD tidak dilakukan secara optimal, maka dapat memperlebar kesenjangan akuntabilitas, karena daerah dengan kapasitas yang baik akan lebih cepat menyesuaikan diri, sedangkan daerah tertinggal. Demikian dengan, SIPD berperan penting dalam mengurangi disparitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, asalkan didukung oleh sumber daya yang memadai dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Setelah dijabarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang sudah dibuat serta dengan adanya teori dalam penelitian ini maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H: SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Disparitas Pengelolaan Keuangan

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, dengan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner melalui Google Forms dan observasi lapangan langsung. Penelitian ini memperoleh 60 sampel dari 96 populasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BAP) Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier sederhana. untuk menganalisis hubungan antara penerapan SIPD dan disparitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengaruh langsung SIPD sebagai variabel utama. Berikut ini adalah ringkasan jumlah responden dari Badan Pengelola Keuangan Daerah di seluruh pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara: Metodologi penelitian ini menguraikan pendekatan yang digunakan, data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

#### Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 2, SIPD memiliki nilai terendah 13 dan nilai tertinggi 23, dengan rata-rata 18,50 dan deviasi standar 2,325. Variabel Disparitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan memiliki rata-rata 18,45 dan deviasi standar 2,487, berkisar antara 14 hingga 25. Statistik deskriptif memberikan gambaran dasar tentang pola distribusi data untuk penelitian ini.

**Tabel 1. Jumlah Responden**

<i>Badan Keuangan</i>	<i>Responden</i>
Bidang Anggaran	15
Bidang Perbendaharaan	14
Bidang Akuntansi	17
Staf Pendamping masing-masing bidang	14
Total	60

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

<i>Variabel</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
SIPD	60	13	23	18,50	2,325
Disparitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	60	14	25	18,45	2,487
Valid (listwise)	60				

Sumber: Data diolah (2025)

**Tabel 3. Uji Reliabilitas**

<i>Variabel</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Standard</i>	<i>Keterangan</i>
SIPD	0,739	0,60	Reliabel
Disparitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	0,848	0,60	Reliabel

**Tabel 4. Uji Normalitas**

<i>Unstandardized Residual</i>		
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std Deviation	1.60572041
Most Extreme Differences	Absolute	.154
	Positive	.089
	Negative	-.154
Test Statistic		154
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 <sup>c</sup>
Exact. Sig. (2-tailed)		.105
Point Probability		.000

**Tabel 5. Uji Persamaan Regresi Sederhana**

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	3.343	1.690		1.977	.053
SIPD	.817	.091	.764	9.006	.000

Sumber: Data diolah (2025)

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menentukan seberapa baik kinerja instrumen penelitian ketika diukur ulang dalam kondisi yang sama. Instrumen yang reliabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2018). Tabel 3 menunjukkan hasil uji reliabilitas penelitian yang telah diolah.

### Uji Normalitas

Tabel 4 menunjukkan bahwa uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menghasilkan *Exact Significance* 0,105. Nilai ini di atas kriteria signifikansi 0,05, menunjukkan data terdistribusi secara teratur.

### Persamaan Regresi Sederhana

Regresi linier sederhana mengukur dan menganalisis hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dalam penerapannya, regresi linier sederhana juga harus memenuhi beberapa asumsi klasik, seperti normalitas residual, homoskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi, agar hasil estimasinya valid dan dapat diinterpretasikan secara akurat.

Nilai signifikansi 0,000 ( $<0,05$ ) pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel SIPD secara substansial memengaruhi dis-

paritas akuntabilitas pengelolaan keuangan. Nilai *t* hitung sebesar 9,006, yang melebihi nilai *t* tabel, mendukung signifikansi statistik hubungan ini. Hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima.

### Pembahasan

#### Pengaruh SIPD Terhadap Disparitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki hubungan positif dan signifikan dengan disparitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara, yang menunjukkan bahwa implementasi SIPD belum merata. SIPD seharusnya mengkonsolidasikan sistem informasi manajemen keuangan daerah secara nasional, namun kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan memengaruhi implementasi di setiap daerah. Daerah yang memiliki kapasitas yang lebih baik dalam hal teknologi informasi, pelatihan ASN, dan komitmen manajerial dapat mengimplementasikan SIPD secara optimal dan meraih akuntabilitas keuangan yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan sumber daya mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem secara

penuh, sehingga kualitas pelaporan dan pengelolaan keuangan cenderung tertinggal. Akibatnya, kesenjangan (disparitas) dalam akuntabilitas keuangan antar daerah justru meningkat seiring dengan penerapan sistem yang belum seragam.

Temuan penelitian ini didukung dengan pendapat Fitriani, (2024) dan Lumuly dan Atarwaman, (2024), yang menyatakan bahwa implementasi teknologi informasi di sektor publik seringkali menimbulkan efek kesenjangan antar daerah apabila tidak diiringi dengan kebijakan afirmatif dan pendampingan yang kuat, khususnya di daerah yang tergolong kurang berkembang. Selain itu, Bustanuddin et al., (2023) menekankan bahwa pelaksanaan SIPD yang tidak dibarengi dengan penguatan SDM dan kesiapan infrastruktur hanya akan menciptakan *asymmetric capacity* antar pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan ketiga penelitian tersebut karena sama-sama menegaskan bahwa keberhasilan SIPD sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama kesiapan SDM, infrastruktur, dan dukungan kebijakan daerah. Tanpa penguatan di aspek-aspek tersebut, SIPD belum mampu menjadi solusi pemerataan akuntabilitas keuangan, dan justru berpotensi menimbulkan disparitas baru antar pemerintah daerah.

Studi ini mengonfirmasi hasil penelitian Naida, (2024) dan Maulani et al., (2024) yang menyatakan bahwa adopsi SIPD memengaruhi pengelolaan keuangan daerah, tetapi keberhasilannya bergantung pada dukungan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia. Implementasi SIPD yang tidak efektif tidak serta merta menurunkan kualitas laporan keuangan. Menurut Wibowo et al., (2023) ini bertentangan dengan penelitian Vitriana et al., (2022) yang menunjukkan bahwa kualitas sistem dan informasi tidak memengaruhi kepuasan pengguna SIPD. Secara praktis, hasil ini menekankan perlunya pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur teknologi, dan peningkatan peran pemda dalam pengawasan serta evaluasi internal. Kementerian Dalam Negeri juga perlu melakukan monitoring lebih ketat

untuk memastikan SIPD tidak hanya diimplementasikan secara formal, tetapi juga substansial.

Dengan demikian, meskipun SIPD secara sistem dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, namun dalam realitasnya sistem ini justru dapat memperlebar kesenjangan antar daerah jika tidak diimplementasikan secara merata dan adil. Oleh karena itu, temuan ini menjadi penting sebagai masukan bagi pembuat kebijakan untuk meninjau kembali strategi pelaksanaan SIPD agar lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi masing-masing daerah.

### Kesimpulan

SIPD telah berjalan secara umum dengan baik pada sebagian besar pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari skor rata-rata responden terhadap variabel SIPD yang berada dalam kategori tinggi. Mayoritas responden menyatakan bahwa SIPD membantu proses pengelolaan informasi keuangan, baik dari segi peningkatan teknologi, sistematisasi, interkoneksi data, maupun kemudahan penggunaan. Meskipun SIPD telah dilaksanakan, penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan antardaerah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kesiapan kelembagaan dalam mendukung sistem. Data ini menunjukkan bahwa SIPD secara signifikan mengurangi disparitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, semakin baik penerapan SIPD maka semakin kecil perbedaan (disparitas) dalam hal akuntabilitas antardaerah, meskipun pengaruh ini belum maksimal karena masih ada hambatan teknis dan non-teknis di lapangan.

Kemudian saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah perlu secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan melalui pelatihan teknis SIPD dan pendidikan akuntansi pemerintahan. Bimbingan teknis (bimtek) dan workshop perlu dilakukan secara rutin di semua level pemerintahan daerah. Perlu dilakukan evaluasi dan

modernisasi perangkat lunak serta perangkat keras penunjang SIPD agar proses input data dan pelaporan tidak terganggu. Pemerintah pusat melalui Kemendagri perlu memfasilitasi pengadaan sistem yang kompatibel dan user-friendly di seluruh daerah. Kementerian Dalam Negeri perlu memantau dan mengevaluasi implementasi SIPD di setiap daerah untuk menentukan efektivitas dan mengidentifikasi permasalahan implementasi. Temuan penilaian ini harus menginformasikan perubahan kebijakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- Bustanuddin, B., Yamin, A., & Zulkieflimansyah, Z. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8405–8410. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3125>
- Fitriani, L. (2024). *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Oleh Teknologi Informasi Tesis* (Tesis).
- Fitriasari, D. (2024). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 34–54. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i2.649>
- Ghozali. (2015). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, M. S. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Pendekatan Praktis Untuk Keberhasilan Organisasi*. Bumi Aksara.
- Istigfarin, W. A., & Andayani, E. S. (2023). Is the Implementation of Problem-Based Learning Appropriate? A Literature Review on Accounting Learning. *Dinamika Pendidikan*, 18(1), 40–52. <https://doi.org/10.15294/dp.v18i1.42143>
- Lumuly, E., & Atarwaman R., J. D. (2024). Pengaruh Implementasi Dan Efektivitas Ssitem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ambon). *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(2).
- Maulani, A., Anshori, M. I., & Andriani, N. (2024). Inovasi Teknologi dalam Pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai Alat untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1415–1422. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3451>
- Naida, N. (2024). Optimalisasi SIPD dan SPIP dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan: Pentingnya Kompetensi SDM. *Solusi*, 22(4), 465–479. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i4.10554>
- Nanda Yoga Aditiya, & Popy Dian Indira Kusuma. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.



- EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(1), 1022–1035.  
<https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i1.3683>
- Paat, F. , F., & Saleh, S. A. ,. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1).
- Putri, R. , N., & Hapsari, D. (2022). Peran Evaluasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Anggaran Dan Evaluasi Publik*, 4(1), 59–72.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jaep.v4i1.59-72>
- Sugiarto., A. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Pegawai dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kinerja Skpd Di Kabupaten Tabalong . *KINDAI*, 16(1), 22–39.  
<https://doi.org/10.35972/kindai.v16i1.362>
- Trinoviani, I. ,. (2019). *Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu*. 11, 1.
- Undang-undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Vitriana, N., Agustawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64.  
<https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Wibowo, D. A., Sasanti, E. E., & Nurabiah, N. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Proses Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Bappeda Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 9(2), 279–287.  
<https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v9i2.528>